

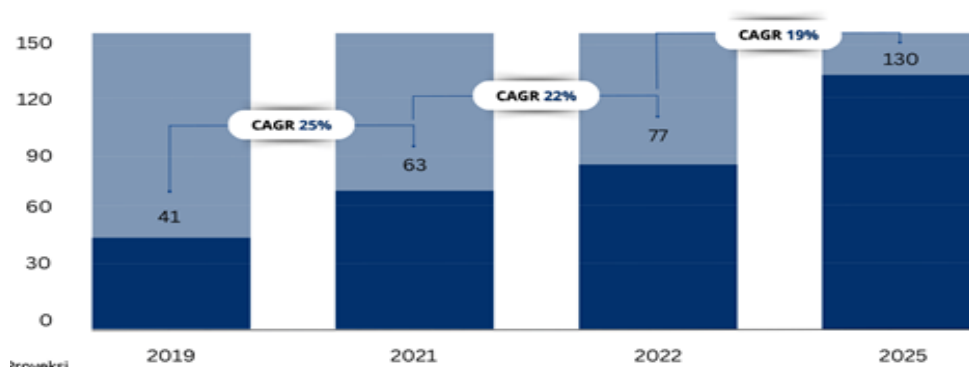
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Ekonomi digital Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan signifikan dengan proyeksi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp4.531 triliun pada tahun 2030. Sektor *e-commerce* menjadi pendorong utama, memberikan kontribusi hingga 34% terhadap total ekonomi digital. Selain itu, pembayaran digital dan layanan berbasis teknologi tumbuh pesat, didukung oleh implementasi QRIS yang telah menjangkau lebih dari 13 juta merchant di seluruh Indonesia, dengan 95% di antaranya berasal dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif digitalisasi ini menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan efisien.

Gambar 1 1 Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia
(Gross Merchandise Value (GMV))



Sumber : *e-Conomy SEA 2022 Report by Google, Temasek, and Brain & Company*

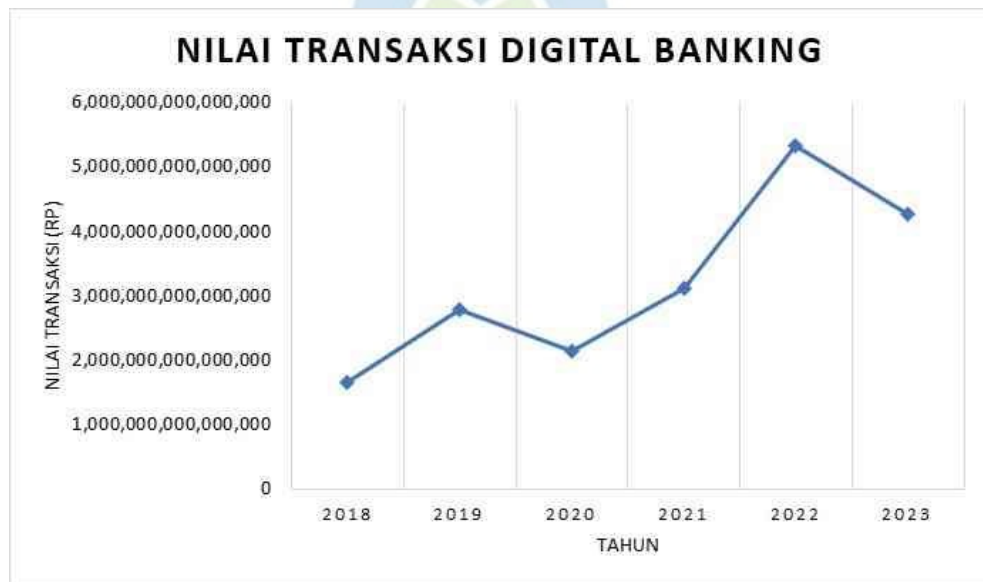
Transformasi digital tersebut didorong oleh semakin tingginya keterbukaan masyarakat terhadap teknologi, terutama setelah pandemi COVID-19. Pandemi ini mempercepat era digitalisasi di Indonesia melalui kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah yang secara tidak langsung mengubah pola komunikasi dan aktivitas masyarakat. Dampaknya, sekitar 21 juta pengguna digital baru muncul, dengan 72% di antaranya berasal dari wilayah non-perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital kini menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya sulit mengakses layanan Pendidikan, kesehatan, dan keuangan konvensional, terutama di perbankan.

Berbicara di sektor keuangan, kehadiran teknologi keuangan seperti *fintech* tumbuh pesat memberikan layanan yang mirip dengan bank, namun lebih cepat dan praktis. Kehadiran *fintech* ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan. Untuk bersaing, bank perlu melakukan digitalisasi agar lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi digital di sektor perbankan pun menjadi langkah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional.

Melihat perubahan yang terjadi, digitalisasi di perbankan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Bank perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas akses keuangan, membantu UMKM, dan mendukung masyarakat *unbankable* agar bisa mendapatkan layanan keuangan. Dengan begitu, perbankan digital dapat berperan besar dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan mampu menghadapi tantangan di era modern.

Saat ini, perbankan digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Sebagai contoh, transaksi digital banking di Indonesia tercatat mencapai Rp4.264,8 triliun pada bulan April 2023, yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 158% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan digital berpotensi besar untuk memperluas inklusi keuangan, termasuk dalam segmen-segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.

Gambar 1.2 Nilai Transaksi Bank Digital 2018-2023



Sumber : databoks.katadata.co.id, 2023

Bagi individu, layanan keuangan digital termasuk *digital banking* dianggap lebih nyaman dan memiliki akses yang lebih mudah karena layanan tersedia melalui perangkat seluler pribadi (Aziz, A. A., Mamat, M. N., Salleh, D. M., Abdullah, S. F. S., & Nordin, M. N, 2021). Sedangkan bagi pelaku usaha terutama UMKM, pinjaman digital telah membantu mereka menghadapi krisis selama pandemi dimana selama ini mereka memiliki keterbatasan akses pada bank konvensional. Layanan keuangan

digital juga memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan keuangan dengan cepat dan aman baik kepada individu maupun pelaku usaha yang sulit dijangkau (Allmen, U. E. v., Khera, P., Ogawa, S., & Sahay, R., 2020).

Barquin, Gantès, HV, dan Shrikhande (2019) menunjukkan adanya adopsi teknologi digital melalui *internet* dan *mobile banking* yang meningkat signifikan pada pengguna jasa keuangan. Layanan perbankan digital seperti Jenius dari Bank BTPN, Bank Jago, Blu by BCA Digital, dan SeaBank telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat. Misalnya, Jenius yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh Bank BTPN, menawarkan kemudahan dalam pengelolaan keuangan melalui fitur-fitur inovatif yang menarik minat pengguna.

Penggunaan layanan perbankan secara digital meningkat 1,6 kali pada 2017 dibandingkan tahun 2014 menjadi 58%. Tren ini semakin menguat selama pandemi COVID-19, di mana berbagai studi dan lembaga melaporkan lonjakan aktivitas keuangan digital secara global akibat pembatasan aktivitas fisik yang mendorong peralihan ke layanan berbasis digital (Nabiela Rizki Alifa & Annisa Nur Salam, 2022). Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada Mei 2024, nominal transaksi perbankan digital mencapai Rp5.570,49 triliun, meningkat 10,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Bank Indonesia, 2024).

Peningkatan adopsi perbankan digital juga didorong oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Survei yang dilakukan oleh Populix (2024) mengungkapkan bahwa bank digital tumbuh pesat karena tingginya adopsi di kalangan Gen Z, yang berusia antara 12 hingga 27 tahun yang memiliki jumlah dominan di Indonesia saat ini.

Melihat peluang yang ada, sebagai penyedia layanan dengan landasan prinsip syariah, beberapa bank digital syariah pun mulai bermunculan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh, Bank Aladin Syariah telah menjadi salah satu pelopor dalam memperkenalkan bank digital berbasis syariah. Dengan fokus pada kemudahan transaksi yang sesuai dengan syariah, Bank Aladin menawarkan platform digital yang mendukung pengelolaan keuangan berbasis halal. Hingga saat ini jumlah nasabah Bank Aladin Syariah mencapai 2,7 juta. Selain itu, bank jago sebagai bank digital dengan pengguna tertinggi, juga turut meluncurkan bank jago syariah sebagai layanan digital berbasis syariah yang pada kuartal I 2024 dengan jumlah nasabah mencapai 1,8 juta dengan pertumbuhan sekitar 500% (Kompas.com, 2024). Selanjutnya ada hijra bank dan nano bank yang membidik 1 juta total nasabah pada tahun 2024.

Dalam konteks kontribusi terhadap perekonomian nasional, bank digital syariah dapat memainkan peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya di segmen masyarakat muslim *unbanked* dan *underserved*. Dengan menjaga stabilitasnya, bank digital syariah mampu memberikan layanan yang lebih luas dan berkelanjutan, mendukung UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, ketidakstabilan pada bank digital syariah dapat menyebabkan ketidakpercayaan di masyarakat, menghambat pertumbuhan sektor ini, dan berpotensi menurunkan kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan demikian, stabilitas perbankan digital syariah harus terus dijaga, demi kepercayaan nasabah dan keberlanjutan operasional mereka dalam jangka panjang. Stabilitas ini tidak hanya mencerminkan kesehatan keuangan sebuah institusi, tetapi juga kemampuannya untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat serta menjadi fondasi keberlanjutan bank dalam menyediakan layanan yang andal, terutama di tengah lingkungan ekonomi sebagai faktor eksternal yang terus berubah.

Sebagai faktor eksternal, tak dapat dipungkiri fluktuasi variabel makroekonomi memengaruhi stabilitas perbankan digital. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lestari, S., & Hermawan, T., 2022), mengungkapkan bahwa suku bunga, sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter, berdampak langsung pada biaya dana yang harus ditanggung bank. Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya modal yang berpotensi mengurangi profitabilitas, sementara penurunan suku bunga, meskipun mendorong pertumbuhan kredit, juga dapat meningkatkan risiko kredit jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga menurunkan kualitas pinjaman dan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Fluktuasi nilai tukar (nilai tukar) menambah kompleksitas, karena depresiasi mata uang dapat meningkatkan biaya transaksi internasional dan kewajiban bank dalam mata uang asing. Pada penelitian Widodo (2023) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) memberikan sinyal penting tentang stabilitas sektor perbankan, dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat berdampak pada penurunan permintaan kredit dan kualitas pembiayaan.

Di samping faktor eksternal, efisiensi operasional yang diukur melalui BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan tantangan internal yang turut mempengaruhi stabilitas perbankan digital syariah. Efisiensi operasional ini memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas keuangan bank, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dari lingkungan makroekonomi, seperti fluktuasi suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi (Eka Violeta Ketaren, Antonius Mulyo Haryanto, 2020).

BOPO digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana bank mampu mengelola biaya operasionalnya dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama. Rasio BOPO yang rendah menunjukkan bahwa bank dapat mengelola biaya secara efektif, sehingga meningkatkan profitabilitas dan kemampuan untuk menghadapi risiko keuangan. Sebaliknya, BOPO yang tinggi dapat menjadi indikasi adanya inefisiensi operasional yang berpotensi mengganggu stabilitas bank, karena laba bersih yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maritsa (2020) menganalisis stabilitas perbankan syariah di Indonesia dan menemukan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap stabilitas perbankan syariah, yang berarti peningkatan BOPO dapat menurunkan stabilitas perbankan syariah.

Dalam perbankan digital syariah, menjaga efisiensi operasional menjadi semakin penting karena persaingan di sektor digital yang sangat ketat. Bank digital syariah harus bersaing tidak hanya dengan bank syariah konvensional tetapi juga dengan bank digital non-syariah dan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi

seperti *fintech*. Dengan tingkat BOPO yang optimal, bank digital syariah dapat memastikan efisiensi operasional yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan mereka dalam jangka panjang.

Berbeda dengan bank umum, bank digital syariah tidak memerlukan infrastruktur cabang fisik, yang memungkinkan mereka untuk menghemat biaya operasional yang tinggi. Dalam penelitian D. Dhany Prasetyo & Dewi Shinta (2022) inovasi *digital banking* mampu meningkatkan efisiensi operasional pada Lembaga keuangan perbankan. Bank Indonesia mencermati peningkatan efisiensi pada operasional perbankan di awal tahun. Lantaran perbankan melakukan penurunan biaya tenaga kerja dan biaya sewa akibat digitalisasi, yang masing-masing turun sebesar 3 bps yoy dan 5 bps yoy hingga Januari 2021. Namun, dalam ekosistem yang sangat bergantung pada teknologi, bank digital syariah tetap perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk pengembangan platform digital, sistem keamanan, serta untuk pengelolaan dan pemeliharaan teknologi. Oleh karena itu, efisiensi biaya menjadi kunci agar bank ini dapat tetap beroperasi dengan keuntungan meskipun tanpa adanya cabang fisik. BOPO yang rendah akan menunjukkan pengelolaan biaya yang baik dan mampu meminimalkan risiko keuangan. Jika bank tidak mampu mengelola biaya ini secara efisien, rasio BOPO akan meningkat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat stabilitas perbankan.

Dalam banyak penelitian sebelumnya, variable makroekonomi sering menjadi fokus utama sebagai faktor eksternal dan BOPO sebagai faktor internal yang memiliki pengaruh stabilitas perbankan syariah. Misalnya, penelitian Hari Subakti, Dr. Mustapa

Khamal Rokan, M.H, Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I (2023) menunjukkan pengaruh signifikan variabel makroekonomi terhadap stabilitas perbankan Syariah, dan Eka Violeta Ketaren, Antonius Mulyo Haryanto (2020) meneliti kekuatan BOPO sebagai variabel intervening antara FDR dan NPF terhadap stabilitas perbankan syariah. Dari beberapa variabel yang diteliti, belum ditemukan perbankan digital syariah sebagai objek penelitian. Hanya saja dalam penelitian yang dilakukan oleh Djuwita, N. Gaib (2019) memiliki objek penelitian perbankan digital namun fokus utamanya pada dinamika hukum yang ada di Indonesia.

Untuk mengisi gap penelitian tersebut, penelitian ini mengombinasikan faktor eksternal (variabel makroekonomi) dan internal (rasio BOPO) sebagai variabel independen guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pengaruhnya terhadap stabilitas perbankan digital syariah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait “ **Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Efisiensi Operasional Terhadap Stabilitas Perbankan Digital Syariah di Indonesia.**” Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi pengelola perbankan dalam memitigasi risiko yang muncul, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor perbankan digital syariah.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis melihat terdapat sebuah hubungan yang memengaruhi suku bunga, nilai tukar, inflasi, PDB terhadap stabilitas perbankan digital di Indonesia

dengann rasio BOPO sebagai factor mediasi. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana suku bunga berpengaruh terhadap terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana inflasi berpengaruh signifikan terhadap terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana nilai tukar berpengaruh terhadap terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana PDB berpengaruh terhadap terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana BOPO berpengaruh terhadap terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana suku bunga, inflasi, nilai tukar, PDB dan rasio BOPO secara simultan memengaruhi stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.

3. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh PDB terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh rasio BOPO terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar, PDB dan rasio BOPO secara simultan terhadap stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Literatur Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah

Penelitian ini memperluas wawasan terkait interaksi antara variable makroekonomi, efisiensi operasional (BOPO), dan stabilitas keuangan perbankan syariah, khususnya di sektor perbankan digital syariah yang menghadapi tantangan teknologi dan dinamika makroekonomi.

b. Peningkatan Pemahaman tentang Efisiensi Operasional. Melalui analisis rasio BOPO sebagai faktor internal, penelitian ini memperdalam teori efisiensi operasional dalam perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mekanisme bagaimana efisiensi biaya operasional memengaruhi hubungan antara fluktuasi makroekonomi dan stabilitas keuangan.

- c. Kontribusi pada Teori Stabilitas Keuangan. Penelitian ini mendukung pengembangan teori stabilitas keuangan dengan fokus pada pendekatan integratif, di mana stabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal (makroekonomi), tetapi juga oleh efisiensi internal bank. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk mengidentifikasi indikator kunci dalam menjaga stabilitas perbankan syariah.
- d. Landasan untuk Penelitian Lanjutan. Penelitian ini membuka peluang untuk studi lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel makroekonomi, efisiensi operasional, dan stabilitas keuangan di berbagai jenis perbankan lainnya, baik syariah maupun konvensional, serta di berbagai negara.

Dengan manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dan menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami hubungan variabel serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Perbankan digital syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan efisiensi operasional dengan memperhatikan faktor-faktor makroekonomi.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penerapan suku bunga, sebagai faktor yang mempengaruhi stabilitas perbankan digital Syariah yang pada akhirnya memberi pengaruh pada kondisi perekonomian nasional.

c. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas bank digital syariah terutama pada aspek efisiensi operasionalnya, sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi investasi pada sektor keuangan khususnya perbankan digital syariah yang terdaftar di OJK.

d. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan dalam pembelajaran tentang ekonomi digital, ekonomi syariah, serta pengaruh variabel makroekonomi terhadap stabilitas perbankan digital.

e. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk memperluas wawasan dan pemahaman terkait kondisi makroekonomi pada stabilitas perbankan Syariah Indonesia melalui efisiensi operasionalnya.

